

**PERANAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DIDESA
TANJUNG BAKAU KECAMATAN RANGSANG
KABUPATEN KEPUALUAN MERANTI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Ekonomi
Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh
Anton Maulana
NIM 10576002200

Jurusan Administrasi Negara
Program S1

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2009

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ANTON MAULANA
NIM : 10576002200
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : PERANAN PENGAWASAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI
DESA TANJUNG BAKAU KECAMATAN RANGSANG
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Mahmuzar, M. Hum
Nip. 150 390 416

Mashuri, MA
NIK. 130 707 11

MENGETAHUI

PEMBANTU DEKAN I

KETUA JURUSAN

Drs. Azwar Harahap, M.Si
NIP. 131 416 135

Drs. Almasri, M.Si
NIP. 196 70801 200 501 1007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara Kesatuan, Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah diterangkan bahwa pembagian daerah di Indonesia berdasarkan atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan pemerintahannya ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kebijakan Otonomi Daerah yang diharapkan adalah sebuah kebijakan otonomi yang mandiri dengan harapan dapat mewujudkan dan memberikan respon secara aktif terhadap kebutuhan, kehendak dan aspirasi masyarakat. Pengembangan dan pembangunan Otonomi Daerah tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang khususnya yang ada di daerah maupun di tingkat nasional.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada tanggal 15 Oktober Tahun 2004, telah memberi wewenang sebesar-besarnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban kepada daerah untuk

mengelola dan mengatur sendiri daerahnya dalam sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang juga mengatur Pemerintahan Desa menegaskan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur Desa dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada dalam wilayah Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menyangkut tentang Peranan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dijelaskan dalam pasal 35 yang menerangkan tentang wewenang BPD mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Dari Peraturan Pemerintah tersebut sangat jelas bahwa, pengawasan yang dilakukan BPD terhadap Pemerintah Desa sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang sangat seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Di dalam usaha mewujudkan pengawasan pembangunan Desa dalam berbagai bidang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya dalam menyikapi tuntutan implementasi Otonomi Daerah sangat memerlukan proses untuk menggalang aspirasi masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sangat memberikan harapan yang besar bagi masyarakat terhadap sebuah implementasi Otonomi Daerah. Hal ini menjadi motivasi dan memberi dinamika serta

suasana baru dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa. Sebab, masyarakat menyadari bahwa keberadaan institusi-institusi demokrasi Desa selama ini berada dalam kondisi yang tidak kondusif dalam kemajuan kemajuan Pemerintah Desa.

Melihat fenomena yang sedemikian rupa, maka sangat diperlukan sebuah badan yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam sebuah proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional. Sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta mengatur rumah tangganya sendiri.

Badan Pengawasan tersebut adalah sebuah konsekuensi implementasi Otonomi Daerah sebagai fundamental pergeseran struktur politik Pemerintah Desa. Eksistensi lembaga ini memiliki tugas, fungsi, kedudukan dan wewenang yang tidak kalah pentingnya dengan pihak eksekutif Desa. Mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Desa, aturan ini juga menjelaskan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa lembaga ini mempunyai tugas dan misi luhur yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sebagai lembaga legislatif tingkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa, lembaga ini mengawasi apakah peraturan Desa yang telah dibuat dilaksanakan oleh

Pemerintah Desa atau tidak serta apakah implementasi peraturan itu sesuai atau tidak dengan yang telah dibuat.

Oleh karena itu, ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian kita dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa. *Pertama*, lahirnya BPD hendaknya memberikan harapan baru bagi demokrasi Desa. BPD diharapkan menjadi arena baru demokrasi Desa, antara lain menjadi tempat pembuatan peraturan Desa yang berbasis pada artikulasi kepentingan masyarakat serta mampu melakukan kontrol pengawasan terhadap sepak terjang Pemerintah Desa. Sebab masalah yang dihadapi masyarakat Desa kian kompleks dan memerlukan perhatian sungguh-sungguh dari berbagai pihak. *Kedua*, perlu dilakukan *capacity building* pengembangan kemampuan BPD sebagai institusi publik ditingkat Desa. *Ketiga*, mengenai sistem pemilihan rekrutmen dan pengisian anggota BPD hendaknya memperhatikan aspek yang tinggi aspiratif dan mempertimbangkan kualitas figur sesuai dengan persyaratan tambahan yang memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Desa. *Keempat*, pembentukan BPD hendaknya menjadi aset pengembangan demokrasi dimasyarakat Desa dari pada sebuah konflik yang mendatangkan prahara yang tak kunjung reda. (Khairul Anwar, 2003 : 5-6)

Fungsi kontrol yang dimiliki BPD hendaknya diarahkan pada upaya terselenggaranya Pemerintahan Desa yang berkualitas, dinamis, transparan, baik dan bersih. Serta mampu memberi perubahan bagi terciptanya Pemerintahan Desa yang baik.

Desa Tanjung Bakau adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perannya sangat dituntut oleh masyarakat serta kebijakan yang dikeluarkan mampu membawa efek positif kepada masyarakat yang diwakilinya.

Namun kenyataan yang terjadi dilapangan, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang perannya masih kurang optimal. Hal ini terbukti *pertama*, kurangnya koordinasi antara BPD dengan masyarakat dalam bidang pembangunan desa seperti perbaikan jalan yang belum dilakukan dan perbaikan rumah miskin belum dilaksanakan. *Kedua*, lemahnya BPD dalam mengawasi anggotanya untuk siap melayani masyarakat yang memiliki kepentingan masih kurang kondusif. *ketiga*, pengurus dari BPD sendiri dari ketua, wakil dan anggotanya kurang mempunyai wawasan tentang Pemerintahan Desa, sehingga apa yang seharusnya dilakukan oleh BPD belum dapat diterapkan sebagaimana yang harus dilakukan oleh BPD. *Keempat*, kurangnya kerja sama yang baik antara BPD dengan Kepala Desa didalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga apa yang menjadi program BPD dan Kepala Desa tidak berjalan secara optimal. *Kelima*, masih lemahnya komunikasi BPD dengan masyarakat didalam proses pembangunan di Desa, sehingga pembangunan yang ada didesa tidak berjalan dengan baik. Seperti pembangunan jalan yang dilakukan oleh desa yang masih terkedala dikarenakan kurang kekompakan antara BPD, Kepala Desa dan masyarakat. Jika peran BPD sungguh-sungguh dilaksanakan dalam pengawasan jalannya Pemerintahan Desa, maka peraturan dapat berjalan sesuai dengan yang

diinginkan dan BPD dapat benar-benar dapat melaksanakan tugasnya didalam mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Didalam pengawasan proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tanjung Bakau BPD harus mempunyai peran aktif didalam proses pelaksanaan Pemerintahan Desa. Karena tanpa pengawasan yang optimal bisa mengakibatkan kendala dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Jadi, peran pengawasan dari BPD sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pemerintahan Desa agar berjalan berdasarkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Setiap anggota BPD sebagai wakil rakyat di tingkat desa memiliki basis legitimasi yang cukup kuat dikarenakan ia dipilih dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD serta memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Oleh karena itu, keberadaan BPD secara normatif memadai terbentuknya lembaga kontrol Kepala Desa dengan menjalankan fungsi *checks and balance* dalam Pemerintahan Desa.

Permasalahan saat ini apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Bakau dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau perubahan peran ini hanya bersifat teoritis sehingga pada tatanan implementasi tidak berperannya lembaga ini yang dibentuk oleh Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga legislatif Desa.

Berangkat dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok penelitian yaitu **“ Bagaimana Peranan Pengawasan Badan Permusyawaratan desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti ”**.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas BPD di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam peranannya sebagai pengawasan

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupten Bengkalis.

- b. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti permasalahan yang sama.
- c. Untuk menyelesaikan tugas akhir guna mendapatkan gelar sarjana pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

D. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Telaah Pustaka

Pada Bab ini mengemukakan berbagai masalah yang berhubungan dengan penelitian yang terdiri dari Kerangka Teori, Definisi Konsep dan Definisi Operasional.

Bab III : Metode Penelitian

Pada Bab ini berisikan bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, hipotesis dan teknik analisa data.

Bab IV : Gambaran umum lokasi penelitian

Pada Bab ini akan dibahas tentang gambaran umum desa lokasi penelitian yang meliputi kondisi geografis, demografi dan struktur organisasi.

Bab V : Hasil penelitian dan pembahasan

Pada Bab ini akan memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang Peranan Pengawasan BPD Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaen Bengkalis.

Bab VI : Kesimpulan dan Saran

Di dalam Bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran dari berbagai pembahasan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Kerangka Pikiran

Pada suatu proses penelitian ilmiah sebagai usaha untuk memperdalam suatu permasalahan maka fungsi kerangka teori sangat membantu dalam menentukan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat. Dengan demikian dalam pemecahan masalah akan tampak lebih jelas sesuai dengan teori itu sendiri. Maka penulis beranjak dalam melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan kondisi organisasi dimana lembaga itu berada dari adanya teori-teori yang tepat yang dapat mendukung dalam upaya pemecahan masalah dalam penelitian penulis.

1. Pengertian Peranan

Berdasarkan referensi yang telah terkumpul, belum ada persamaan persepsi tentang arti kata peranan. Karena itu dalam rangka menyatukan persepsi, maka berikut ini akan disajikan beberapa definisi tentang kata peranan. Menurut Soejono Soekanto (2005 : 243) Peranan adalah *pertama*, merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam hal ia menjalankan suatu peranan. *Kedua*, peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang dan peranan itu menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. *Ketiga*, peranan adalah diatur norma-norma yang berlaku misalnya norma kesopanan menghendaki agar seseorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita, harus disebelah luar.

Menurut Miftah Toha (1990 : 25) peranan dirumuskan suatu rangkaian perilaku yang tujuannya ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Dengan demikian peranan mencakup paling sedikitnya dalam tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep atau prihal apa yang didapat oleh individu didalam masyarakat didalam suatu organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu dalam struktur sosial masyarakat, (Soejono Soekanto 2005 : 244)

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu komplek penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan tertentu dalam keadaan sosial tertentu.

2. Pengertian Desa

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada diwilayah Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005, desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya Masyarakat setempat.

Pakar sejarah memandang desa sebagai sumber kekuatan dan ketahanan dasar dalam mempertahankan kemerdekaan *community power*. Menurut Muhadan Labowo (2006 : 133) Desa dianggap sebagai sumber nilai luhur yang memiliki karakteristik seperti gotong royong, musyawarah mufakat dan kekeluargaan sehingga menimbulkan berbagai semboyan.

3. Pemerintahan Desa

Hakikat Otonomi Desa adalah efesiensi dan efektifitas dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang ada pada akhirnya bernuansa pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang hakikatnya semakin lama semakin baik, disamping memberikan peluang peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara luas dalam konteks demokrasi. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi mitra kerja Pemerintah Desa.

Perubahan peraturan tentang pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah membawa konsekwensi penting terhadap elemen dasar pemerintah, yaitu Pemerintahan Desa. Meskipun tidak begitu signifikan perubahan yang ditampilkan oleh Undang-Undang tersebut dibanding Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. namun dapat dipahami bahwa pengaturan Pemerintahan Desa tampak mengalami perhatian serius oleh pemerintah pusat melalui perubahan format badan-badan pelaksana dan pertanggungjawaban

Pemerintah Desa. Pada bagian ini akan dibahas perubahan atas format pemerintahan desa menurut perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan mempersoalkan kembali relativitas Otonomi Desa secara normatif dengan membandingkan dalam realitas penyelenggaraannya.

Pertama, adanya pemisahan antara kekuasaan eksekutif desa dan legislatif desa BPD. Dengan adanya pemisahan tersebut maka kekuasaan mulai dibagi, dipisahkan serta dibatasi. Eksekutif desa tidak lagi menjadi “pusat” dari proses pembuatan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan desa, namun hanya sebagai pelaksana kebijakan. Proses pembuatan kebijakan desa dilakukan dengan jalan melibatkan partisipasi masyarakat melalui saluran formal berupa lembaga legislatif desa BPD dan dapat difungsikan oleh masyarakat untuk melakukan kontrol atas pelaksanaan kebijakan desa yang dilakukan oleh Eksekutif Desa.

Dengan adanya pemisahan kekuasaan antara Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa maka telah terjadi perubahan struktur Pemerintahan Desa yang tidak lagi bersifat sentralistik berganti dengan pengaturan Pemerintahan Desa secara demokratis melalui pemberian wadah bagi adanya partisipasi oleh warga desa.

Kedua, penyederhanaan proses sistem hirarki birokrasi. Jika pada masa orde baru Pemerintah Desa hanya menjadi sub bagian dari Kabupaten yang dapat dikontrol dan diintervensi melalui Kecamatan. Dengan adanya struktur Pemerintahan Desa yang baru, maka kecamatan tidak lagi membawahi desa, dan desa dapat langsung berhubungan dengan Kabupaten. Hubungan antara dua desa

dan Kabupaten yang kemudian diatur lebih dalam hubungan-hubungan yang bersifat formalistik.

Hal tersebut misalnya tercermin dalam mekanisme pertanggungjawaban Kepala Desa yang lebih ditekankan untuk diberikan kepada masyarakat melalui lembaga BPD dan ketingkat Kabupaten lebih bersifat pelaporan. Dengan adanya struktur yang demikian, maka jalannya Pemerintahan Desa dapat lebih dikontrol oleh masyarakat desa itu sendiri dan bukan oleh pemerintahan yang lebih atas. Dengan kata lain proses yang terjadi di desa lebih ditekankan pada dinamika internal desa dibandingkan dengan instruksi dari hirarki pemerintah di atasnya.

Badan permusyawaratan desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislatif, BPD mempunyai hak untuk menyetujui atau tidak terhadap Kebijakan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dapat membuat Rancangan Peraturan Desa secara bersama-sama Pemerintah Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Disini telah terjadi mekanisme *check and balance system* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis. Dalam komposisi BPD sebagai lembaga pengawasan, BPD memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan Desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai

dengan kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Pemerintahan Desa yang didalamnya juga termasuk Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu badan untuk pembuatan kebijakan dan peraturan desa yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di daerah dimana ia tinggal dan kebijakan ini akan ditetapkan berdasarkan persetujuan Kepala Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 14 tentang desa menjelaskan tugas, fungsi, kewajiban dan hak kepala desa adalah :

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD.
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan desa mengenai rancangan APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa.
 - f. Membina perekonomian desa.
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat mengajukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Memelihara kesatuan dan ketertiban masyarakat.
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
 - e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
 - f. Menjalin hubungan dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa.
 - g. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-Undangan.
 - h. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan baik.
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat didesa.
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.

- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
 - n. Memperdayakan masyarakat dan kelembagaan didesa dan
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
4. Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/wali kota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban BPD, serta menginformasikan laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
 5. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 kali dalam satu tahun.
 6. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan satu kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
 7. Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
 8. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
 9. Laporan masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa, Pemerintah Desa dan BPD dapat membangun kerja sama untuk mendorong kemandirian dan kreativitas dalam proses mengelola rumah tangga Pemerintahan Desa dengan memanfaatkan potensi yang ada, konsekwensi dalam hal ini adalah Pemerintah Desa dan BPD harus dapat menggali sumber daya yang tersedia bagi pemanfaatan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat di desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan perwakilan yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat di Desa yang mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh pemuda atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Jumlah anggota BPD ditetapkan dalam jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, dan kemampuan keuangan Desa.

5. Pengawasan

1. Pengertian pengawasan

Beberapa pengertian pengawasan telah banyak dikemukakan oleh penulis dibidang manajemen.

Menurut S. P Siagian (2004 : 49) pengawasan merupakan langkah dan sekaligus fungsi organik manajemen yang sangat penting dikatakan demikian itu karena melalui pengawasanlah diteliti apakah hal yang tercantum akan dilaksanakan dengan baik atau tidak. Menurut Dr. Kartini Kartono (2002 : 153) memberikan pengertian pengawasan adalah pada umumnya para pengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran-sasaran dan tujuan umum organisasi. Pengawasan dilakukan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut.

2. Tujuan pengawasan

Tujuan dan fungsi pengawasan sebagai suatu proses pengamatan dari seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Proses pengawasan tersebut bertujuan untuk tercapainya tujuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan (S. P Siagian 2004 : 112.)

Tujuan dilakukannya pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang objek pengawasan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan diwaktu akan datang. Pada dasarnya pengawasan harus dapat mengukur apa yang

harus dicapai, menilai pelaksanaan serta mengadakan tindakan perbaikan dan penyesuaian yang dianggap perlu.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya, maka fungsi pengawasan itu juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sudah berjalan agar dapat tetap tercapai apa yang telah direncanakan.

4. Jenis Pengawasan

Dalam suatu organisasi dikenal beberapa jenis pengawasan yang sering dilakukan sebagai mana mestinya. Yaitu sebagai berikut :

a. Pengawasan dari dalam organisasi (internal kontrol)

Pengawasan dari dalam artinya, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan dari dalam organisasi, dalam hal ini pengawasan BPD terhadap pelaksanaan tugas BPD yang bertindak atas nama masyarakat di Desa.

b. Pengawasan luar organisasi (eksternal kontrol)

Pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawas dari luar organisasi yang bertindak atas nama organisasi.

c. Pengawasan Preventif

Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan atau dikerjakan yang bertujuan untuk mencegah kesalahan atau penyimpangan di dalam melakukan kegiatan organisasi..Dalam hal ini misalnya menentukan peraturan-peraturan sesuai dengan prosedur,

hubungan dan tata kerja atau menentukan pedoman kerja sesuai dengan peraturan atau kebutuhan yang telah ditentukan

d. Pengawasan Reprensif

Pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan dengan cara menilai dan memberikan pelaksanaan pelayanan dan rencana yang telah ditetapkan, kemudian diambil tindakan agar pelaksanaan pekerjaan selanjutnya dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

e. Pengawasan Melekat

Merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan reprensif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Pengawasan fungsional

Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasan yang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independen terhadap obyek yang diawasi. Pengawasan fungsional tersebut dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai

tugas dan fungsinya melakukan pengawasan fungsional melalui audit, investigasi, dan penilaian untuk menjamin agar penyelenggaraan

pemerintahan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

g. Pengawasan masyarakat

merupakan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan antara lain dalam bentuk pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi non pemerintah, serta pengaduan dan pemberian informasi baik secara langsung maupun melalui media masa atau opini publik mengenai pelayanan terhadap masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam hal pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, menyangkut dengan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada pemerintahan atasannya melalui BPD, maka diperlukan format pertanggungjawaban yang dapat dinilai oleh BPD. Agar supaya tidak terjadi polemik dan menimbulkan persoalan baru antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tentang pertanggungjawaban tersebut, maka materinya perlu dinyatakan terperinci dan dimuat dalam peraturan daerah Kabupaten (Khairul Anwar, 2003 : 40.).

5. Pengawasan dalam Pemerintahan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan perwakilan yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat didesa yang mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa seperti pengawasan implementasi Peraturan Desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) serta meminta pertanyaan kepada Kepala Desa dalam melaksanakan fungsinya sebagai Kepala Desa.

6. Prosedur Pengawasan

Prosedur pengawasan Badan Permusyawaratan Desa kepada Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Meminta Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mengajukan pertanyaan, maksudnya adalah pertanyaan yang diajukan anggota BPD sebagai Badan Legislatif desa terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Meminta keterangan kepada Kepala Desa terhadap proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- h. Meminta laporan pertanggungjawaban kepala desa 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Berbeda dengan masa orde baru Pemerintahan Desa belum bias mengatur rumah tangganya sendiri, pada priode reformasi perubahan yang cukup substansial dalam tata Pemerintahan Desa, hal ini terjadi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa khususnya yang mengatur mengenai Pemerintahan Desa pada pasal 39 - 111. pasal 95 terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut nama lain dengan Kepala Desa. pasal 104 menegaskan keberadaan BPD yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat

peraturan desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kedua pasal itu mengindikasikan adanya struktur dan fungsi baru kelembagaan di desa. Kepala Desa kini tidak lagi dapat berkuasa secara absolut seperti sebelumnya, harus menjalankan fungsi administrasi dan pembuatan keputusan desa dengan pengawasan BPD (Heru Cahyono, 2005 : 4-5).

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah jelas bahwa Lembaga Legislatif Daerah memiliki kedudukan, wewenang, hak dan fungsi yang sangat berbeda dibandingkan masa lalu. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi. Bahkan secara substansif DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Dari prospektif politik, DPRD memiliki otoritas politik dalam menjalankan fungsinya.

Demikian halnya dengan hadirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau lebih populer disebut Parlemen Desa *village concil*. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 209 mengganti nama Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Sedangkan keanggotaannya ditetapkan dalam pasal 210 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi :

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dari dan oleh anggota badan permusyawaratan desa.
3. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 masa jabatan berikutnya.
4. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Peranan pengawasan BPD dipertegas pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pada Pasal 35 dan 37 mengenai wewenang, kewajiban dan hak penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BPD mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa
- c. Mengusulkan pengangkatan kepala desa dan pemberhentian Kepala Desa
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib BPD

BPD mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Menyerap, menampung, menghipun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat setempat, dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan masyarakat.

Anggota BPD memiliki hak sebagai berikut :

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan pendapat
- d. Memilih dan dipilih
- e. Memperoleh tunjangan

Beda halnya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 104 yang menyatakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa memiliki fungsi antara lain :

1. Mengayomi adat istiadat

2. Membuat Peraturan Desa
3. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
4. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari ketua dan wakil ketua, wakil ketua sebanyak 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa. Pimpinan BPD dipilih langsung dalam rapat BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan BPD dibantu oleh sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.

B. Definisi Konsep

Menurut Masri Singarimbun (2006 : 34) Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.

Untuk memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian, maka definisi beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Peran adalah perbuatan atau tindakan yang sesuai dengan jabatan fungsi masing-masing dalam hal ini pemerintah desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa.
2. Pengawasan adalah serangkaian usaha untuk menetapkan suatu pekerjaan atau kegiatan, menilai dan mengoreksi kegiatan

tersebut dengan tujuan agar kegiatan yang dimaksud sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3. Badan Permusyawaratan Desa BPD adalah institusi politik lokal semacam DPRDesa yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi tingkat desa, yang memiliki tugas mengayomi adat istiadat dan membuat peraturan desa. BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah pelaksanaan Pemerintahan Desa seperti melaksanakan implementasi peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variable sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variable tersebut (Masri Singarimbun, 2006 : 46).

Dalam penulisan proposal penelitian ini, peneliti membuat variable dengan indikator sebagai berikut. Adapun Variabel dalam penelitian ini adalah

“Peranan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Dengan indicator sebagai berikut :

1. Teknik pengawasan
 - a. Melakukan interviu kepada Kepala Desa terhadap Penyelenggaran Pemerintahan Desa.
 - b. Meminta laporan pertanggungjawaban kepala desa setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
2. Langkah pengawasan
 - a. Pemeriksaan terhadap Administrasi Pemerintahan Desa
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan lainnya
 - c. Pemeriksaaan terhadap pelaksanaan keputusan Kepala Desa
 - d. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja desa (APBDesa)
 - e. Pemeriksaan terhadap kebijaksanaan Pemerintahan Desa
 - f. Pemeriksaan pelaksanaan prosedur Pemerintahan Desa apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
3. Membandingkan hasil pemeriksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan
4. Evaluasi pengawasan merupaka penilaian legislatif terhadap eksekutif dari pekerjaan apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan.

5. Perbaikan pengawasan, yaitu melakukan perbaikan apabila dalam pengawasan dijumpai penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif yaitu suatu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian secara jelas dan lebih mendetail konfrenhensip serta untuk menarik generalisasi yang menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.

Penelitian diskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variable yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis. Waktu penelitian dilakukan pada bulan februari tahun 2009.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005 : 90).

Berdasarkan data yang diterima tahun 2008, jumlah anggota Badan Permusyawartan Desa di Desa Tanjung Bakau berjumlah 9 orang dan jumlah

Perangkat Desa di Desa Tanjung Bakau sebanyak 9 orang. Jadi jumlah populasi keseluruhan adalah 18 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan biaya maka peneliti dapat menggunakan sample yang diambil dari populasi itu apa yang dipelajari, untuk itu sample yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili) (Sugiono 2005 : 91).

Tabel 1.1 : Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi (Orang)	Sampel (Orang)	Persentase (%)
1	Perangkat Desa	9	9	100,00
2	BPD	9	9	100,00
	Jumlah	18	18	100,00

Sumber Data: Kantor Desa Tanjung Bakau 2009

Didalam penelitian ini yang menjadi populasi dan sampel adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta Perangkat Desa di Desa Tanjung Bakau kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis. Mengingat jumlah populasi relatif sedikit atau kurang dari 30, maka seluruh populasi dalam penelitian ini menjadi sample, dengan menggunakan teknik pengambilan sample jenuh atau disebut sensus.

D. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian, data ini berupa tanggapan responden dan hasil wawancara serta menyebarkan kuesioner.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, seperti suatu organisasi BPD, Monografi desa dan tokoh Masyarakat Desa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan relevan dengan tujuan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Wawancara, yaitu yang dilakukan melalui responden seperti, anggota BPD dan masyarakat setempat.
- b. Kuesioner, adalah daftar pertanyaan yang telah disediakan oleh peneliti kepada responden.
- c. Observasi, merupakan penelitian dengan cara mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tepat pada objek penelitian.

F. Hipotesis

Hipotesis adalah prinsip yang logis dan diterima secara rasional tanpa mempercayainya sebagai kebenaran sebelum diuji kebenarannya. Berdasarkan uraian didalam latar belakang dan kerangka teori diatas diduga bahwa : Pengawasan yang dilakukan oleh BPD belum optimal, karena masih minimnya pengetahuan dari BPD tentang pengawasan yang harus dijalankan, sehingga menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak berjalan dengan baik. karna itu :

“jika pengawasan yaang dilakukan BPD baik, maka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan secara optimal “.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data diperoleh melalui penelitian diskriptif kualitatif. Artinya teknik ini berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian serta berusaha menjelaskan dan menggambarkan variable penelitian secara mendalam dan konfrehensif sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah dirumuskan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa

Desa Tanjung Bakau adalah Desa yang berada dalam wilayah Pemerintahan Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Nama Tanjung Bakau awalnya diambil dari gabungan dua kata yaitu Tanjung dan Bakau. Tanjung didalam bahasa melayu adalah daerah yang berada di kepulauan, dan Bakau adalah suatu tanaman hutan yaitu hutan Bakau. Dengan kondisi wilayah yang berada di daerah Tanjung dan memiliki banyak tanaman hutan Bakau, maka nama Tanjung Bakau diambil oleh masyarakat pada waktu itu sebagai nama Desa dengan harapan agar masyarakat dapat menjaga kelestarian hutan Bakau dan menjaga pulau yang telah ada.

Wilayah Tanjung Bakau dahulunya adalah wilayah yang rata-rata penduduknya bersuku melayu, karna suku melayu adalah suku yang pertama masuk dan bermukim di daerah tersebut. Lama kelamaan banyak pendatang yang datang dari pulau jawa yang dominan bersuku jawa sehingga masyarakat jawa menjadi semakin banyak dan sampai sekarang mendominasi dari pada suku melayu. Di daerah Tanjung Bakau tersebut hanya ada dua suku yaitu suku jawa dan suku melayu yang sudah hidup membaaur sehingga menjadi masyarakat yang solid dan kompak.

Awalnya Desa Tanjung Bakau adalah nama suatu daerah yang berada dalam wilayah pemerintahan Desa Tanjung Samak, kemudian setelah diadakannya

pemekaran desa pada Tahun 2005 yang menjadi 2 (dua) Desa yaitu Desa Tanjung Bakau, dan Desa Teluk Samak. Desa Tanjung Bakau sampai saat ini masih dipimpin oleh Kepala Desa terpilih periode 2005-2010 yaitu Hasan Alwi dan Faisal masrur sebagai Sekretaris Desanya.

B. Geografis dan Demografis Desa Tanjung Bakau

1. Geografis Desa Tanjung Bakau

Desa Tanjung Bakau adalah salah satu Desa yang teletak paling ujung sebelah timur dari Ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti dan bertetangga dengan Kabupaten Karimun yang termasuk dalam wilayah pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebuah kabupaten yang terdiri dari Kecamatan Merbau, Rangsang, Rangsang Barat, Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi Barat. Nama Meranti diambil dari singkatan lima kecamatan tersebut.

Tuntutan pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti sebenarnya sudah diperjuangkan oleh masyarakat sejak Tahun 1957. Seruan pemekaran kembali dihembuskan tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008 yang tentunya tidak terlepas dengan berbagai gejolak politik yang ada di daerah meranti maupun di Kabupaten Bengkalis sebagai Kabupaten asal dari Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pada tanggal 19 Desember 2008, DPR RI mengesahkan pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Riau yang terpisah dari Kabupaten Bengkalis.

Kemudian pada tanggal 26 Mei dilantiklah Drs. H. Syamsuar, M.Si sebagai Plt Bupati Kepulauan Meranti dan Rosfian sebagai Sekdanya.

Desa Tanjung Bakau memiliki luas wilayah lebih kurang 3200 Ha. Jarak antara Desa dengan kecamatan sekitar 1 km. jarak antara Desa dengan Ibukota Kabupaten sekitar 123 km yang hanya dapat ditempuh dengan transportasi laut. Sedangkan jarak antara Desa dengan Ibukota Provinsi sekitar 189 km dan hanya dapat ditempuh dengan transportasi laut.

Ketinggian tanah di Desa Tanjung Bakau dari permukaan laut sekitar 2,5 M dengan daratan rendah, tinggi dan pantai dan memiliki curah hujan 1716 mm/t serta dengan suhu udara rata-rata 28-30 C (Monografi Desa Tanjung Bakau)

Desa Tanjung Bakau berbatasan dengan :

- a. Disebelah utara Desa Tanjung Bakau berbatasan dengan Desa Tanjung Medang
- b. Disebelah selatan desa Tanjung Bakau berbatasan dengan Selat Air Hitam
- c. Disebelah barat berbatasan dengan Desa Tanjung Samak.
- d. Disebelah timur desa Tanjung Bakau berbatasan dengan Desa Tanjung Medang.

Desa tanjung bakau saat ini dipimpin oleh Hasan Alwi sebagai Kepala Desa Tanjung Bakau dan dibantu oleh stafnya atau aparat pemerintahan diantaranya:

- a. Sekretaris Desa : Faisal masnur
- b. Kepala Urusan Pemerintahan : Rajulaini
- c. Kepala Urusan Pembangunan : Fadli

- d. Kepala Urusan Umum : Khoiri
- e. Kepala Urusan Keuangan : Erma

2. Demografi Desa Tanjung Bakau

a. Struktur Penduduk

Penduduk yang berdomisili di Desa Tanjung Bakau hanya ada suku jawa dan suku melayu. Namun mayoritas bersuku jawa kemudian sebagian bersuku melayu. Penduduk yang bersuku jawa rata-rata bertempat tinggal didaerah darat sedangkan penduduk yang bersuku melayu rata-rata bertempat tinggal didaerah sebelah laut atau berdekatan dengan laut. Penduduk Desa Tanjung Bakau mayoritas memiliki mata pencaharian kelapa dan padi atau disebut sebagai petani. Untuk lebih jelasnya tentang penduduk desa tanjung bakau dapat dilihat pada tabel-tabel pengklasifikasian penduduk Desa Tanjung Bakau di bawah ini :

Tabel IV.1 Klasifikasi Penduduk Desa Tanjung Menurut Suku

No	Jenis Suku	Jumlah
1	Jawa	1299 Orang
2	Melayu	881 Orang
Jumlah		2180 Orang

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Tanjung Bakau Tahun 2009

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk Desa Tanjung Bakau yang berasal dari suku jawa lebih banyak dari pada penduduk yang berasal dari suku melayu pada Tahun 2009, dengan jumlah penduduk yang bersuku jawa sebanyak 1299 Orang, sedangkan penduduk yang bersuku melayu hanya berjumlah 881 Orang dari jumlah penduduk Desa Tanjung Bakau yang berjumlah sebanyak 2180 orang.

Untuk mengetahui klasifikasi penduduk Desa Tanjung Bakau berdasarkan jenis kelamin dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2 Klasifikasi Penduduk Desa Tanjung Bakau Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1039 Orang
2	Perempuan	1141 Orang
Jumlah		2108 Orang

Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Bakau Tahun 2009

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Tanjung Bakau yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada penduduk yang berjenis kelamin laki-laki. Dimana jumlah penduduk Desa Tanjung Bakau yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1141, sementara penduduk Desa Tanjung Bakau yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1039 dari jumlah penduduk keseluruhan yaitu 2180 jiwa.

Untuk mengetahui jumlah penduduk Desa Tanjung Bakau menurut umur, dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel IV.3 Klasifikasi Penduduk Desa Tanjung Bakau Berdasarkan Umur

No	Umur (Tahun)	Laki-laki	perempuan	Jumlah
1	0-5 Tahun	101	107	208
2	6-10 Tahun	108	112	220
3	11-20 Tahun	138	172	310
4	21-30 Tahun	132	191	323
5	31-40 Tahun	199	196	395
6	41-50 Tahun	212	198	410
7	50 Tahun keatas	149	165	314
Jumlah		1039	1141	2180

Sumber : Kantor Kepala Desa Tamjung Bakau Tahun 2009

Dari rincian tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk Desa Tanjung Bakau yang berumur 31 s/d 50 tahun merupakan penduduk yang paling banyak dengan jumlah 805 orang, sedangkan penduduk Desa Tanjung Bakau yang paling sedikit yaitu berkisar dari umur 0 s/d 10 tahun dengan jumlah 428 orang. Dengan demikian bahwa generasi muda yang akan meneruskan perjalanan pemerintahan di Desa Tanjung Bakau lebih sedikit dibandingkan generasi yang sudah tua.

b. Pendidikan

Penduduk yang ada di Desa Tanjung Bakau pada umumnya dapat membaca dan menulis, hal ini ditunjukkan dengan pengakuan Pemerintah Kecamatan pada Tahun 2007 bahwa penduduk Desa Tanjung Bakau bebas buta aksara. Meski demikian penduduk Desa Tanjung Bakau secara formal ada yang hanya tamat sekolah dasar (SD) dan ada juga yang sampai pada tingkat Perguruan Tinggi.

Untuk mengetahui rinci tentang tingkat pendidikan penduduk Desa Tanjung Bakau dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tanjung Bakau

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak sekolah	95	05,19 %
2	Belum sekolah	191	10,21 %
3	Taman kanak-kanak (TK)	73	05,10 %
4	Sekolah dasar (SD)	612	25,09 %
5	SLTP	625	25,14 %
6	SLTA	504	15, 16 %
7	Perguruan tinggi/STAI	80	05,11 %
Jumlah		2180	100 %

Sumbher Data : Kantor Kepala Desa Tanjung Bakau Tahun 2009

Dari tabel diatas dapat ketahui bahwa penduduk Desa Tanjung Bakau yang hanya menamatkan pendidikannya di Sekolah Dasar (SD) cukup banyak, ini menunjukkan tingkat pendidikan penduduk Desa Tanjung Bakau masih rendah, walaupun ada diantara mereka yang berpendidikan sampai Keperguruan Tinggi.

Untuk menyelenggarakan pendidikan formal, di Desa Tanjung Bakau telah tersedia lembaga pendidikan mulai dari TK, SD, SLTP, SLTA hingga Perguruan Tinggi.

Untuk mengetahui lembaga pendidikan formal yang telah ada di Desa Tanjung Bakau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.5 Fasilitas Pendidikan Formal di Desa Tanjung Bakau

No	Jenis Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	TK	-	1	1
2	MDA	-	5	5
3	SD	2	-	2
4	SLTP	2	-	2
5	SLTA	1	-	1
6	Perguruan Tinggi	-	1	1
Jumlah		5	7	12

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Tanjung Bakau Tahun 2009

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan formal Desa Tanjung Bakau terdapat 12 lembaga pendidikan, yaitu 1 buah pendidikan TK, 5 buah pendidikan MDA, 2 buah pendidikan SD, 2 buah pendidikan SLTP, 1 buah pendidikan SLTA, dan 1 buah lembaga Perguruan Tinggi.

c. Mata Pencarian

Sesuai dengan daerah yang mempunyai iklim tropis dan berada dipinggiran laut dan sungai, pada sisi lain komposisi lainnya terdiri dari tanah liat, tanah reda, dan rawa-rawa sehingga mata pencaharian masyarakat beraneka ragam. Sebagian besar masyarakat Desa Tanjung Samak menjadi petani kemudian nelayan, buruh, pedagang, pegawai negeri, karyawan dan lain-lainnya.

Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat Desa Tanjung Bakau, dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

Tabel IV. 6 Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanjung Bakau.

NO	Mata Pencaharian	Jumlah	persentase
1	Pegawai Negeri	10 Orang	02,15 %
2	Karyawan	170 Orang	10,05 %
3	Pedagang	198 Orang	10,20 %
4	Nelayan	187 Orang	10,15 %
5	Petani	690 Orang	20,35 %
6	Buruh	144 Orang	10,11 %
7	Jasa Angkutan	45 Orang	03,09 %
8	Tanggungan Orang Tua	736 Orang	30,15 %
Jumlah		2180 Orang	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Tanjung Bakau Tahun 2009

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Tanjung Bakau bermata pencaharian sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penduduk Desa Tanjung Bakau pada umumnya bekerja sebagai petani padi dan kelapa. Penduduk Desa Tanjung Bakau yang bekerja sebagai Pegawai Negeri memang baru 10 orang, namun sudah banyak generasi muda yang melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi yang ada di Propinsi Riau. Kemudian penduduk

yang masih dalam tanggungan orang tua masih kelihatan sangat banyak dengan jumlah 736 orang.

f. Agama

Sejak awal penduduk Desa Tanjung Bakau sudah menganut agama islam, begitu pula dengan para pendatang yang datang dari pulau jawa merekapun beragama islam. Penduduk Desa Tanjung Bakau secara keseluruhan memeluk agama islam. Di Desa Tanjung Bakau penduduknya ada juga yang menimba ilmu agama di pulau jawa, dan kebanyakan di jawa timur. Untuk lebih jelasnya mengenai agama dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel IV.7 Agama Penduduk Desa Tanjung Bakau

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2180
2	Katolik	-
3	Protestan	-
4	Budha	-
5	Hindu	-
Jumlah		2180

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Tanjung Bakau Tahun 2009

Dari tabel diatas sangat jelas diketahui bahwa penduduk Desa Tanjung Bakau secara keseluruhan menganut agama Islam deanagn jumlah 2180 orang. Memang orang yang beragama selain islam tidak ada yang datang untuk bertempat tinggal di desa ini, hal ini dikarnakan masyarakat belum bisa menerima kedatangan warga yang Non muslim.

Di Desa Tanjung Bakau hanya ada rumah ibadah bagi orang islam yaitu masjid dan mushala dengan jumlah yang sesuai dengan keadaan penduduk masyarakat Desa Tanjung Bakau. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.8 Rumah Ibadah di Desa Tanjung Bakau

No	Jenis rumah ibadah	Jumlah
1	Masjid	4 buah
2	Mushalla	7 buah
3	Gereja	-
4	Vihara	-
Jumlah		11

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Tnjung Bakau Tahun 2009

Tabel diatas memberikan penjelasan bahwa rumah ibadah yang ada di Desa Tanjung Bakau hanyalah rumah ibadah bagi umat muslim yaitu Masjid dan Mushalla. Karma penduduk Desa Tanjung Bakau semuanya beragama Islam.

g. Adat istiadat

Masyarakat di Desa Tanjung Bakau hanya digolongkan dalam dua jeis suku saja, yaitu suku Jawa dan suku Melayu. Antara adat suku Jawa dan adat suku Melayu di Desa Tanjung Bakau sudah berbaur sejak lama. Setiap ada acara yang membawa adapt istiadat dari salah satu suku mereka sangat mudah untuk mempelajari adat suku yang lain, jadi ketika ada suatu perhelatan atau acara pesta pernikahan atau sunatan, masyarakat di Desa Tanjung Bakau sudah sama berbaur menjadikan adapt tersebut sebagai suatu persamaan keakraban walaupun terdapat sedikit perbedaan di dalam pelaksanaannya.

C. Sejarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Berdirinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Bakau

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahdaerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang sekarang sudah diubah lagi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, peraturan tersebut menjelaskan tentang institusi lokal yang ada di Desa yaitu BPD yang berperan sebagai mitra Pemerintahan Desa, untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Bakau dibentuk akibat dikeluarkannya Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Bengkalis tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2005 tentang pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) yang slanjutnya melalui camat rangsang agar dapat membentuk Badan Perwakilan Desa di desa tersebut. Sejalan denagn hal itu maka Kepala Desa Tanjung Bakau menyelenggarakan rapat desa yang membahas tentang pembentukan BPD, sehingga dibentuklah panitia pembentukan BPD Tanjung Bakau.

Pemilihan anggota BPD diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Tanjung Bakau yang terdiri dari 4 dusun dengan jumlah kursi yang direbutkan sebanyak 9 kursi karma penduduk Desa Tanjung Bakau berjumlah 2180.

Pada tanggal 2 juni 2005 Bupati Bengkalis membuat surat keputusan Nomor 143 Tahun 2005 tentang pengesahan BPD. Berdasarkan keputusan Bupati Bengkalis tersebut, maka BPD Desa Tanjung Bakau telah resmi menjadi lembaga yang kuat secara hukum dan fakta, karena melalui prosedur Pernudang-Undangahn yang telah berlaku.

2. Jumlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Bakau

Jumlah anggota BPD di Desa Tanjung Bakau priode 2005-2010 berjumlah 9 orang yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis apabila jumlah penduduk di Desa tersebut berjumlah dari 2.000-2.500 jiwa maka jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desanya berjumlah 9 orang yang terdiri atas kalangan adat, agama, organisasi sosial, golongan profesi, dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

D. Kedudukan, Tugas Wewenang dan Fungsi BPD

1. Kedudukan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kedudukan sebagai berikut:

- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi yang berdasarkan Pancasila
- b. Badan permusyawaratan desa (BPD) berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintahan Desa.
- c. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

2. Tugas dan Wewenang

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
3. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
6. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
7. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat
8. Menyusun tata tertib BPD

3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung, menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

E. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur Organisasi dan uraian tugas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Bakau dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Bakau terdiri dari :

- I. Ketua : Hasbullah ilham

II. Wakil Ketua I : Misnu

Wakil Ketua II : Suharno

III. Bidang-bidang

1. BIDANG I : Pemerintahan dan Pembangunan

Ketua : Nurmuddin SH

Anggota : Syafarudin Sifa

2. BIDANG II : Perekonomian dan Keuangan

Ketua : Milatul bahri

Anggota : Rifindi

3. BIDANG III : Kesejahteraan Rakyat

Ketua : Syafarudin mahadi

Anggota : In'am

Uraian tugas masing-masing bidang Badan Permusyawaratan Desa {BPD} di Desa Tanjung Bakau antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

- a. Pemerintahan : meliputi pemerintahan, ketertiban, pemerangan, hukum/perundang- undangan, kepegawaian/ aparatur, perizinan, politik, organisasi masyarakat dan pertahanan.
- b. Pembangunan : meliputi pekerjaan umum, tata Desa, pertamanan, kebersihan, perhubungan, pertambanagn dan energi, perumahan rakyat dan lingkungan hidup.

2. Bidang Perekonomian dan Keuangan

- a. Perekonomian : meliputi perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan logistik, koperasi dan pariwisata.
- b. Keuangan : meliputi keuangan Desa, perpajakan, restribusi, perbankan, dunia usaha dan penanaman modal.

3. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Meliputi ketenagakerjaan, pendidikan ilmu dan teknologi, kepemudaan dan olahraga, agama, kebudayaan sosial, kesehatan dan keluarga berencana, peranan wanita dan transmigrasi.

Tahap-tahap perumusan BPD melalui bidang-bidang terhadap penyusunan perencanaan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tanjung Bakau sebagai berikut :

1. Melakukan rancangan terhadap Peraturan Desa yang termasuk tugas bidang masing-masing.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa serta Peraturan Perundang-Undangan lain. Keputusan Kepala Desa, pelaksanaan APBDes, kebijakan Pemerintah Desa serta pelaksanaan kerja sama Desa.
3. Membantu ketua BPD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Kepala Desa kepada BPD dengan jalan musyawarah.
4. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa melalui ketua BPD terhadap rencana perjanjian kerja sama menyangkut kepentingan Desa mengenai usaha masyarakat dalam bidang perkebunan dan perikanan.

5. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa.
6. Mengadakan pinjaman dan kunjungan yang dianggap perlu oleh bidang yang bersangkutan atas persetujuan ketua BPD.
7. Mengadakan rapat kerja dengan Kepala Desa, Lembaga/Badan dan Organisasi Kemasyarakatan.
8. Mengajukan usul dan saran kepada ketua BPD yang termasuk dalam ruang lingkup tugas masing-masing bidang.
9. Memberikan laporan kepada ketua BPD tentang hasil pekerjaan bidang dalam mengawasi kinerja Pemerintah Desa.

BAB V

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

Di dalam Bab ini dibahas tentang penyajian data yang diperoleh selama masa penelitian, data tersebut akan disajikan dalam bentuk diskripsi sesuai dengan jumlah sampel yang berjumlah 18 orang.

Untuk memperoleh data maka digunakan teknik pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner, wawancara langsung dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tertutup dan responden hanya memilih salah satu jawaban yang tersedia. Setiap pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner akan didistribusikan dalam bentuk tabel dan selanjutnya akan didistribusikan.

Hasil penelitian akan dibagi ke dalam dua bagian yang meliputi :

1. Bagian pertama berisikan pertanyaan yang memuat identitas responden yang terdiri dari 3 pertanyaan.
2. Bagian ke dua berisikan pertanyaan dari satu variabel penelitian peranan pengawasan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari empat bagian yaitu, teknik pengawasan, langkah-langkah pengawasan, membandingkan hasil penelitian dengan rencana yang telah ditetapkan, evaluasi pengawasan dan melakukan perbaikan setelah melakukan pengawasan. Angket disebarikan kepada BPD yang terdiri dari 21 pertanyaan.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari kuesioner tersebut, dibawah ini disajikan table-tabel yang disertai dengan jawaban responden kemudian diinterpretasikan sebagai berikut :

A. Identitas Responden

Brdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada responden, maka diperoleh data sebagai berikut :

Tabel V.1 Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Frekwensi	persentase
1	laki-laki	17	92,86 %
2	perempuan	1	7,14 %
jumlah		18	100 %

Sumber Data : Penelitian Tahun 2009

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 17 orang (92,86 %), sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan hanya 1 orang (7,14 %).

Tabel V.2 Distribusi Jawaban Responden Berasarkan Umur

No	Keterangan umur	Frekwensi	persentase
1	21-27	4	28,58 %
2	28-34	2	14,29 %
3	35-41	6	32,86 %
4	42-48	4	28,58 %
5	49-55	2	14,29 %
jumlah		18	100 %

Sumber Data : Penelitian Tahun 2009

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 118 responden , terdapat 4 orang (28,58 %) yang berumur 21-27 tahun, 2 orang (14,29 %) yang berumur 28-34 tahun, 6 orang (42,86 %) yang berumur 35-41, 4 orang (28,58 %) yang berumur 42-48, dan 2 orang (14,29 %) yang berumur 49-55 tahun.

Tabel V.3 Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Frekwensi	persentase
1	SD	4	28,58 %
2	SLTA	4	28,58 %
3	SLTA	6	32,86 %
4	Diploma	2	14,29 %
5	Strata 1	2	14,29 %
jumlah		18	100 %

Sumber Data : Penelitian Tahun 2009

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa dari 18 responden terdapat 4 orang (28,58) responden yang berpendidikannya hanya sampai di SD, 4 orang (28,58) responden yang tamatan SLTA, 6 orang (42,86) responden tamatan SLTA, 2 orang (14,29) responden tamatan Diploma dan 2 orang (14,29) responden yang tamatan Strata Satu (S 1).

B. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Dari Satu Variabel Penelitian

Dalam mengukur Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Tanjung Bakau penulis sudah membuat beberapa pertanyaan melalui angket-angket yang akan digunakan untuk mengetahui bagaimana Peranan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis.

Dalam penelitian ini sebagai responden yaitu dari pihak Legislatif Desa. Di sini akan disajikan distribusi jawaban responden dari pihak Legislatif Desa.

Tabel V.4 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Anggota BPD Mengerti Tugas, Kewajiban Dan Wewenang Pemerintahan Desa

No	Keterangan	Frekwensi	Persentase
1	Sangat tahu	18	100 %
2	Tahu	-	-
3	Cukup tahu	-	-
4	Kurang tahu	-	-
5	Tidak tahu	-	-
jumlah		18	100 %

Sumber Data : Penelitian Tahun 2009

Berdasarkan table di atas dapat disimpulkan bahwa semua responden (100 %) mengatakan mengerti mengenai tugas, kewajiban dan wewenang Pemerintahan Desa.

Bertepatan dengan keterangan di atas, hasil interview penulis dengan Suharno anggota BPD (wawancara 20 mei 2009), ia mengatakan sebagai seorang wakil dari masyarakat Desa BPD harus mengetahui tugas, kewajiban dan wewenang dari Pemerintahan Desa. Sebab jika ia tidak mengerti fungsinya sebagai Legislatif Desa, maka tugas yang akan dijalankan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam aturan BPD, maka dari itu BPD harus mengetahui apa saja yang menjadi tugasnya sebagai Legislatif Desa.

Selanjutnya menurut Hasan Alwi (Kepala Desa Tanjung Bakau), ia mengatakan sebagai pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, artinya kita harus mengetahui semua tugas, fungsi dan wewenang sebagai pemerintahan desa (wawancara 20 mei 2009).

Kemudian menurut Faisal masrur (sekretaris desa) wawancara 20 mei 2009, ia mengatakan sebagai perangkat desa kami pasti mengetahui apa yang harus kami lakukan untuk melayani masyarakat.

Tabel V.5 Distribusi Jawaban Responden Tentang Anggota BPD Pernah Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

No	Keterangan	Frekwensi	Persentasi
1	selalu	18	100 %
2	pernah	-	-
3	Kadang-kadang	-	-
4	Sangat jarang	-	-
5	Tidak pernah	-	-
Jumlah		18	100 %

Sumber Data : Penelitian Tahun 2009

Dari table di atas dapat diketahui bahwa semua responden (100 %) mengatakan selalu melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa.

Bersamaan dengan itu, hasil interview penulis dengan ketua BPD Hasbullah ilham (Wawancara 21 mei 2009) ia megatakan selalu melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar dapat tercapai apa yang menjadi kepentingan desa. Melihat dari penerapan Otonomi Daerah, sangat diperlukan pengembangan desa yang maksimal menuju Otonomi Desa yang mandiri, maka dari itu BPD harus selalu melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa agar keberadaan BPD benar-benar dapat dirasakan perannya oleh masyarakat.

Tabel V.6 Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Apakah Pemerintah Desa Sudah Dengan Baik Menjalankan Tugas Dan Kewajibannya Sebagai Pemerintahan Desa

No	Keterangan	Frekwensi	Persentase
1	Sangat baik	10	60 %
2	Baik	8	40 %
3	Cukup baik	-	-
4	Kurang baik	-	-
5	Belum baik	-	-
Jumlah		18	100 %

Sumber Data : Penelitian Tahun 2009

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 18 responden terdapat 10 orang responden (60 %) yang mengatakan pemerintah desa sudah sangat baik di dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pemerintahan desa, kemudian 8 orang responden (40 %) mengatakan pemerintahan desa sudah baik di dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Pemerintahan Desa.

Sehubungan dengan hal itu interview penulis dengan Rifindi salah seorang anggota BPD (wawancara 21 mei 2009) ia mengatakan bahwa selama ini kami melihat Pemerintah Desa sudah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, dan semua urusan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang berhubungan dengan masyarakat sudah berjalan dengan lancar dan selama ini kami belum mendapatkan keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan Pemerintah Desa Tanjung Bakau kepada masyarakat.

Kemudian hasil interview penulis dengan Fadli kepala urusan pembangunan (wawancara 21 mei 2009) mengatakan kami sebagai Pemerintah Desa harus menjalankan fungsi kami sebagai Pemerintah Desa, sebab jika kami tidak menjalankan fungsi tersebut maka apa yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Desa tidak akan berjalan.

Tabel V.7 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pemerintahan Desa Sudah Dengan Baik Menjalankan Setiap Peraturan Yang Telah di Buat

No	keterangan	Frekwensi	persentase
1	Sangat baik	17	90 %
2	Baik	1	10 %
3	Cukup baik	-	-
4	Kurang baik	-	-
5	Belum baik	-	-
Jumlah		18	100 %

Sumber Data : Penelitian Tahun 2009

Dari table di atas dapat diketahui bahwa dari 18 orang responden, terdapat 17 (90 %) mengatakan Pemerintah Desa sudah sangat baik dalam menjalankan peraturan desa yang telah dibuat, kemudian 1 orang responden (10 %) yang mengatakan Pemerintah Desa sudah baik dalam menjalankan peraturan desa yang telah di buat.

Sesuai dengan hasil interview dengan Nurmuddin SH salah seorang anggota BPD {wawancara 21 mei 2009} ia mengatakan bahwa BPD bahwa BPD melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa dan menjalankan peraturan-peraturan desa yang ada namun selama ini BPD menganggap Pemerintahan Desa belum pernah melakukan penyimpangan melainkan kurang produktif dalam menyikapi permasalahan yang ada di desa. Salah satu bentuk konkrit pengawasan adalah meminta pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun.

Sejalan dengan hal tersebut hasil interview penulis dengan Khorri sebagai Kepala Urusan Umum BPD (wawancara 21 mei 2009) ia mengatakan peraturan Desa sangat perlu didalam menjalankan fungsi sebagai Pemerintahan Desa seperti Desa tanjung bakau ini apalagi di Daerah Otonomi seperti sekarang ini, Desa

menjadi entitas politik sendiri artinya desa memiliki wewenang untuk mengembangkan potensi yang ada intervensi dari Pemerintahan Kecamatan. Kebijakan-kebijakan mengenai Desa juga diserahkan kepada BPD dan Kepala Desa. Kedua lembaga tersebut dipilih secara demokratis yang berwenang untuk membuat peraturan yang berkenaan dengan kepentingan Desa. Kami sebagai BPD bersama Kepala Desa telah membuat peraturan desa tersebut dan kami telah menjalankan peraturan itu dengan semaksimal mungkin karena itu adalah untuk kepentingan masyarakat Desa.

Sementara itu menurut Fiasal masnur sekretaris Desa Tanjung Bakau (wawancara 22 mei 2009) mengatakan melihat pentingnya peraturan desa karena desa tersebut dapat mengikat aktifitas di Desa baik aktifitas Pemerintah Desa maupun aktifitas-aktifitas masyarakat Desa. Dengan peraturan Desa ini, semua pekerjaan Pemerintahan Desa dapat terarah dengan baik dan memiliki kekuatan hukum serta dijadikan pedoman di dalam menjalankan aktifitas Pemerintahan di Desa.

Table V.8 Distribusi Jawaban Responden Tentang Anggota BPD Mengetahui Apa Saja Yang Menjadi Program Pemerintah Desa

No	Keterangan	Frekwensi	Persentase
1	Sangat tahu	18	100 %
2	Tahu	-	-
3	Cukup tahu	-	-
4	Kurang tahu	-	-
5	Tidak tahu	-	-
Jumlah		18	100 %

Sumber Data : Penelitian Tahun 2009

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa dari 18 responden, semuanya mengatakan sangat tahu apa saja yang menjadi program pemerintah Desa.

Berkenaan dengan keterangan di atas, hasil interview penulis dengan Safarudin mahadi salah seorang anggota BPD (wawancara 22 mei 2009) mengatakan kami sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mengetahui apa saja yang menjadi program dari pemerintah desa, seperti di dalam pembuatan APBDesa BPD dapat melihat apa saja yang menjadi program Pemerintah Desa. Jika kami tidak mengetahui apa saja yang menjadi program pemerintah desa bagaimana kami akan melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sesuai hasil interview penulis dengan Rajulaini salah seorang Perangkat Desa (wawancara 22 mei) ia mengatakan bahwa BPD pernah menanyakan tentang program Pemerintah Desa bagia pengembangan masyarakat terutama tentang program yang dilakukan Pemerintah Desa, mengenai dana yang turun dari pemerintah kabupaten bengkalis. BPD juga pernah menanyakan apakah program Pemerintah Desa tersebut sudah berdasarkan dari aspirasi masyarakat.

Table V.9 Distribusi Jawaban Responden Tentang Apakah Program Pemerintah Desa Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat

No	Keterangan	Frekwensi	Persentase
1	Sangat sesuai	16	80,5 %
2	Sesuai	-	-
3	Cukup sesuai	2	10,5 %
4	Kurang sesuai	-	-
5	Tidak sesuai	-	-
Jumlah		18	100 %

Sumber Data : Penelitian Tahun 2009

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 18 orang responden, terdapat 16 responden (80,5 %) mengatakan program pemerintah desa sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian 2 responden (10,5 %) mengatakan bahwa program pemerintah tersebut cukup sesuai.

Sementara itu menurut Misnu salah seorang anggota BPD (wawancara 22 Mei 2009) mengatakan selama ini kami melihat Pemerintah Desa sudah melakukan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hal ini terbukti dengan adanya dukungan dari masyarakat terhadap program tersebut, seperti program gotong royong yang dilaksanakan satu bulan sekali pada RW masing-masing dan program itu sangat diterima oleh masyarakat, dan selama ini saya belum pernah mendengar adanya keluhan dari masyarakat tentang program tersebut.

Table V.10 Distribusi Jawaban Responden Tentang Anggota BPD Tahu Penganggaran Belanja Dan Pendapatan Desa

No	Keterangan	Frekwensi	Persentase
1	Sanagat tahu	18	100 %
2	Tahu	-	-
3	Cukup tahu	-	-
4	Kurang tahu	-	-
5	Tidak tahu	-	-
Jumlah		18	100 %

Sumber Data : Penelitian Tahun 2009

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 18 orang responden seluruhnya (100 %) mengatakan sangat tahu tentang Penganggaran Belanja dan Pendapatan Desa.

Sesuai dengan hasil interview penulis dengan rajulaini kepala urusan pemerintahan (wawancara 22 Mei 2009) mengatakan penyusunan APBDesa sangat diperlukan karena dengan anggaran tersebut, keuangan Desa dapat

dialokasikan dengan baik, perlunya ABPDesa agar keuangan desa dapat diawasi dan sekaligus dapat terarah penggunaannya. Beliau juga mengatakan ABPDesa pernah dibuat pertama kali pada tahun 2005 ketika desa diseluruh kabupaten bengkalis mendapat dana dari pemerintah kabupaten sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan dana itu dialokasikan pada pengembangan ekonomi kerakyatan.

Sehubungan dengan hal diatas menurut kepala desa tanjung bakau Hasan Alwi {wawancara 22 mei 2009} mengatakan bahwa selama ini kami menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dengan semaksimal mungkin dan kami melakukan program Desa dengan dana tersebut.

Table V.11 Distribusi Jawaban Responden Tentang Anggota BPD Mengetahui Penganggaran Yang Digunakan Oleh Pemerintah Desa

No	Keterangan	Frekwensi	Persentase
1	Sangat mengetahui	18	100 %
2	Mengetahui	-	-
3	Cukup mengetahui	-	-
4	Kurang mengetahui	-	-
5	Tidak mengetahui	-	-
Jumlah		18	100 %

Sumber Data : Penelitian Tahun 2009

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 18 orang responden seluruhnya (100 %) mengatakan sangat mengetahui mengenai penganggaran yang digunakan oleh pemerintah desa.

Senada dengan itu hasil interview penulis dengan Safarudin sifa salah seorang anggota BPD (wawancara 20 mei 2009) mengatakan sebagai anggota BPD yang dipilih langsung oleh masyarakat kami harus mengetahui penganggaran yang digunakan oleh Pemerintah Desa, dengan kita mengetahui penganggaran

yang digunakan oleh pemerintah desa maka kita dapat melihat implementasi dari penganggaran tersebut.

Menurut Khoiri, Kepala Urusan Umum (wawancara 21 mei 2009) mengatakan selama ini BPD sudah melakukan pengecekan terhadap penganggaran yang digunakan oleh Pemerintah Desa seperti penganggaran dalam melakukan suatu kegiatan MTQ tingkat Desa, peringatan HUT RI serta mengecek anggaran yang digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Desa. Jadi setiap ada kegiatan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, kami selaku BPD harus melakukan pemeriksaan dari setiap hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa tersebut.

Table V.12 Distribusi Jawaban Responden Tentang Anggota BPD Pernah Melakukan Pengawasan Terhadap Penggunaan APBDesa

No	Keterangan	Frekwensi	Persentase
1	Selalu	-	-
2	Pernah	18	100 %
3	Kadang-kadang	-	-
4	Sangat jarang	-	-
5	Tidak pernah	-	-
Jumlah		18	100 %

Sumber Data : Penelitian Tahun 2009

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 18 orang responden seluruh responden (100 %) mengatakan selalu melakukan pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Sejalan dengan itu seorang anggota BPD Milatul Bahri (wawancara 22 mei 2009) mengatakan BPD melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBDesa atau dana lainnya dalam bentuk meminta laporan pertanggungjawaban pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran. Selain itu anggota BPD juga selalu

memantau dilapangan bagaimana pelaksanaan program kerja tersebut. BPD juga melakukan pengawasan terhadap tanah kas desa yaitu tanah yang ditanami karet. Sehubungan dengan itu Kepala Desa Tanjung Bakau Hasan alwi (wawancara 21 mei 2009) mengatakan ia sering melaporkan pengguynaan keuangan Desa yang diminta oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kemudian hasil interview penulis dengan Khoiri Kepala Urusan Umum (wawancara 20 mei 2009) mengatkan selama ini kami melihat BPD sering melakukan pengawasan terhadap APBDesa, BPD juga selalu menanyakan berapa dana yang digunakan Pemerintah Desa dalam menjalankan setiap program Desa dalam waktu satu hulan.

Table V.13 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Anggota BPD Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Keputusan Dan Kebijakan Pemerintahan Desa Lainnya

No	Keterangan	Frekwensi	Persentase
1	Selalu	18	100 %
2	Pernah	-	-
3	Kadang-kadang	-	-
4	Sangat jarang	-	-
5	Tidak pernah	-	-
Jumlah		18	100 %

Sumber Data : Penelitian Tahun 2009

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua responden (100 %) mengatakan selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dan kebijakan Pemerintaha Desa lainnya.

Dari hasil inmterview penulis dengan suharno salah seorang anggota BPD (wawancara 20 mei 2009) mengatakan mengatakan sebenarnya keputusan Kepala Desa secara tertulis seperti aturan operasional belum pernah dijumpai, tetapi keputusan yang berbentuk surat keputusan misalnya SK distribusi khusus pasar

satu minggu sekali dan keputusan yang bersifat instruksional misalnya membuat acara perlombaan yang pada umumnya perlombaan untuk memperingati Hari Ulang Tahun RI dan itu menggunakan dana Desa. Aturan seperti itu ada dan BPD selalu mengawasi hal tersebut, bentuk konkritnya BPD meminta pertanggungjawaban Kepala Desa dalam satu tahun sekali.

Berkenaan dengan hal di atas hasil interview penulis dengan Sekretaris Desa Faisal Masrur (wawancara 22 mei 2009) ia mengatakan kami selalu melakukan rapat dengan BPD tentang program desa ke depan dan biasanya diforum itulah BPD sering menanyakan tentang keputusan Kepala Desa dan BPD juga selalu datang ke kantor untuk berkonsultasi dengan Perangkat Desa untuk melihat apakah keputusan dan kebijakan Kepala Desa itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Desa setempat.

Table V.14 Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Apakah BPD Melakukan Wawancara Dengan kepala Desa Mengenai Pelaksanaan Pemerintahan Desa

No	Keterangan	Frekwensi	Persentase
1	Selalu	-	-
2	Pernah	18	100 %
3	Kadang-kadang	-	-
4	Sangat jarang	-	-
5	Tidak pernah	-	-
Jumlah		18	100 %

Sumber Data : Penelitian Tahun 2009

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 18 orang responden semuanya (100 %) mengatakan selalu melakukan wawancara dengan Kepala Desa mengenai pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Sehubungan dengan itu hasil interview penulis dengan Hasullah ilham selaku ketua BPD (wawancara 20 mei 2009) ia mengatakan kami selalu

melakukan wawancara dengan Pemerintahan Desa tentang anggaran yang akan ditetapkan untuk menjadi program tahunan, kemudian kami juga akan selalu melakukan wawancara tentang pembangunan Desa terutama pembangunan proyek yang turun dari pemerintahan kabupaten bengkalis seperti pembangunan perbaikan rumah adat dan rumah orang miskin. Kemudian kami juga pernah melakukan konsultasi kepada Pemerintah Desa tentang keluhan masyarakat kepada Pemerintah Desa.

Hasil interview penulis dengan Khoiri selaku Kepala Urusan Umum BPD (wawancara 21 mei 2009) ia mengatakan selama ini BPD selalu melakukan wawancara dengan Pemerintah Desa tentang pelaksanaan Pemerintah Desa, pelayanan pemerintah desa pada masyarakat, BPD juga pernah mengundang Pemerintah Desa untuk menanyakan apakah ada kendala dari Pemerintah Desa dalam menjalankan fungsinya sebagai Pemerintah Desa di Desa Tanjung Bakau.

Table V.15 Distribusi Jawaban Responden Tentang Kepala Desa Pernah Melaporkan Kerja Pemerintah Desa Kepada BPD

No	Keterangan	Frekwensi	Persentase
1	Selalu	-	-
2	Pernah	18	100 %
3	Kadang-kadang	-	-
4	Sangat jarang	-	-
5	Tidk pernah	-	-
Jumlah		18	100 %

Sumber Data : Penelitian Tahun 2009

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua responden (100 %) mengatakan pemerintah desa pernah melaporkan kerja Pemerintah Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Senada dengan itu hasil interview penulis dengan Safarudin Sifa salah seorang anggota BPD (wawancara 21 mei 2009) mengatakan selama ini Pemerintah Desa selalu melaporkan hasil kerja pemerintah Desa kepada BPD paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Seperti melaporkan penggunaan anggaran, pelaksanaan atau pengoperasian peraturan-peraturan yang telah dibuat bersama. BPD sendiri pernah menolak laporan pertanggungjawaban Kepala Desa pada tahun 2006 karena tersangkut pada masalah keuangan yang kurang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan bersama-sama BPD dalam pembuatan APBDesa Tahun 2005, kemudian Kepala Desa diminta untuk melengkapi kekurangannya kemudian diadakan laporan pertanggungjawaban ulang.

Hal yang sama disampaikan oleh Nurmuddin SH (wawancara 22 mei 2009)ia mengatakan setiap tahun sekali Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban kepada BPD dan kemudian disampaikan kepada Bupati Bengkalis melalui Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) terutama masalah dana operasional dari Pemerintah Kabupaten.

Table V.16 Distribusi Jawaban Responden Tentang Anggota BPD Melakukan Pemeriksaan Terhadap Administrasi Pemerintahan Desa

No	Keterangan	Frekwensi	Persentase
1	Selalu	18	100 %
2	Pernah	-	-
3	Kadang-kadang	-	-
4	Sangat jarang	-	-
5	Tidak pernah	-	-
Jumlah		18	100 %

Sumber Data : Penelitian Tahun 2009

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semua responden (100 %) mengatakan selalu melakukan pemeriksaan terhadap administrasi Pemerintahan Desa.

Sehubungan dengan keterangan di atas, hasil interview penulis dengan Milatul Bahri salah seorang anggota BPD (wawancara 18 mei 2009), ia mengatakan kami selalu melakukan pemeriksaan terhadap administrasi Pemerintahan Desa kami juga pernah menanyakan tentang tata cara pembuatan akte tanah dan pembuatan kartu tanda penduduk dan kami juga sering berkonsultasi kepada Pemerintah Desa terutama kepada Kepala Desa tentang proses administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Hasil interview penulis dengan Sekretaris Desa Faisal Masrur (wawancara 18 mei 2009) mengatakan selama ini BPD selalu melakukan pemeriksaan terhadap administrasi Pemerintahan Desa dan BPD juga pernah menanyakan kepada Pemerintah Desa tentang administrasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Desa

Table V.17 Distribusi Jawaban Responden Tentang Anggota BPD Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa Dan Peraturan-Peraturan Lainnya

No	Keterangan	Frekwensi	Persentase
1	Selalu	16	80,5 %
2	Pernah	-	-
3	Kadang-kadang	2	10,5 %
4	Sangat jarang	-	-
5	Tidak pernah	-	-
Jumlah		18	100 %

Sumber Data : Penelitian Tahun 2009

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 18 orang responden terdapat 16 orang responden (80,5 %) yang mengatakan selalu melakukan

pemeriksaan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan-peraturan lainnya, kemudian 2 orang responden (10,5 %) mengatakan hanya kadang-kadang di dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan-peraturan lainnya.

Hasil interview penulis dengan In'am salah seorang anggota BPD (wawancara 19 mei 2009) mengatkan BPD Tanjung Bakau selalu emlakukan pengawasan kepada pemerintah desa tentang pelaksanaan peraturan-peraturan yang ada. Dan selama ini BPD menganggap bahwa Pemerintah Desa belum pernah melakukan penyimpangan, hanya saja kurang produktif di dalam menyikapi permasalahan didesa. Salah satu bentuk konkrit pengawasan yang dilakukan oleh BPD adalah meminta laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa setiap satu kali dalam setahun.

Kemudian hasil interview penulis dengan Khoris selaku Kepala Urusan Umum (wawancara 19 mei 2009) ia mengatakan bahwa selama ini BPD hanya kadang-kadang saja di dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan-peraturan lainnya.

Table V.18 Distribusi Jawaban Responden Tentang Anggota BPD Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa

No	Keterangan	Frekwensi	Persentase
1	Selalu	-	-
2	Pernah	18	100 %
3	Kadang-kadang	-	-
4	Sangat jarang	-	-
5	Tidak pernah	-	-
Jumlah		18	100 %

Sumber Data : Penelitian Tahun 2009

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa semua responden (100 %) mengatakan BPD pernah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan keputusan Kepala Desa.

Senada dengan hal itu interview penulis dengan Hasbullah Ilham selaku ketua BPD (wawancara 20 Mei 2009) ia mengatakan bahwa kami BPD pernah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan keputusan kepala desa seperti keputusan kepala desa melakukan perlombaan dalam memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia serta keputusan Kepala Desa mengenai pemungutan dana dari pasar satu minggu sekali di Desa Tanjung Bakau.

Sehubungan dengan itu hasil interview penulis dengan Fadli selaku kepala urusan pembangunan (wawancara 22 Mei 2009) ia mengatakan selama ini saya melihat BPD pernah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan keputusan Kepala Desa, BPD menanyakan apakah keputusan yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa itu sudah dijalankan atau belum, ia juga mengatakan percuma kalau keputusan itu dibuat tetapi tidak dilaksanakan.

Table V.19 Distribusi Jawaban Responden Tentang Anggota BPD Melakukan Pemeriksaan Terhadap Kebijakan Pemerintahan Desa

No	Keterangan	Frekwensi	Persentase
1	Selalu	-	-
2	Pernah	18	100 %
3	Kadang-kadang	-	-
4	Sangat jarang	-	-
5	Tidak pernah	-	-
Jumlah		18	100 %

Sumber Data : Penelitian Tahun 2009

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semua responden (100 %) mereka mengatakan BPD pernah melakukan pemeriksaan terhadap kebijaksanaan Pemerintahan Desa.

Sejalan dengan itu hasil interview penulis dengan Milatul Bahri (wawancara 22 mei 2009) ia mengatakan kami BPD sebagai wakil dari masyarakat Desa harus melakukan pemeriksaan terhadap kebijaksanaan pemerintah desa, ini bertujuan agar kami dapat melihat apakah kebijaksanaan Desa itu sesuai atau tidak dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Table V.20 Distribusi Jawaban Responden Tentang Anggota BPD Membandingkan Hasil Pemeriksaan Dengan Rencana Yang Telah Ditetapkan

No	Keterangan	Frekwensi	Persentase
1	Selalu	-	-
2	Pernah	18	100 %
3	Kadang-kadang	-	-
4	Sangat jarang	-	-
5	Tidak pernah	-	-
jumlah		18	100 %

Sumber Data : Penelitian Tahun 2009

Dari table diatas dapat diketahui bahwa semua responden (100 %) mengatakan BPD pernah membandingkan hasil pemeriksaan dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

Bersamaan dengan itu hasil interview penulis dengan anggota BPD Suharno (wawancara 19 mei 2009) mengatakan kami selaku BPD pernah melakukan pengawasan yaitu melakukan perbandingan dengan melakukan pemeriksaan apakah program yang dijalankan Pemerintah Desa selama ini sesuai atau tidak dengan prosedur yang berlaku, jadi dengan pemeriksaan tersebut

anggota BPD dapat mengetahui apakah ada penyimpangan atau tidak dari Pemerintah Desa dalam melaksanakan program yang telah direncanakan.

Senada dengan itu menurut Sekretaris Desa Tanjung Bakau Faisal Masrur (wawancara 18 mei 2009) ia mengatakan selama ini saya melihat BPD pernah melakukan pemeriksaan dengan rencana yang telah ditetapkan dan kemudian BPD menanyakan mengapa selama ini Pemerintah Desa kurang produktif dalam melaksanakan peraturan desa serta kebijaksanaan yang dibuat oleh Kepala Desa Itu sendiri

Table V.21 Distribusi Jawaban Responden Tentang Anggota BPD Meminta Keterangan Berkenaan Dengan Suatu Kebijakan Pemerintahan Desa

No	Keteranagn	Frekwensi	Persentase
1	Selalu	-	-
2	Pernah	18	100 %
3	Kadang-kadang	-	-
4	Sangat jarang	-	-
5	Tidak pernah	-	-
Jumlah		18	100 %

Sumber Data : Penelitian Tahun 2009

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa semua responden (100 %) megatakn pernah meminta keterangan berkenaan dengan suatu kebijakan Pemerintahan Desa.

Hasil interview penulis dengan anggota BPD Rifindi (wawancara 20 mei 2009) mengatakan sebagai wakil dari masyarakat Desa anggota BPD harus mengerti minimal tahu apa saja yang menjadi program Desa supaya BPD dapat melihat apakah program itu susuai atu tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat Desa Tanjung Bakau ini.

Senada dengan itu hasil interview penulis dengan Khoiri Kepala Urusan Umum (wawancara 20 mei 2009) mengatakan selama ini BPD selalu meminta keterangan apabila Pemerintah Desa membuat suatu kebijakan minimal BPD menanyakan apa tujuan dari program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa tersebut, serta apakah kebijakn itu dibuat dikarenakan adanya keluhan dari masyarakat kepada Pemerintah Desa.

Table V.22 Distribusi Jawaban Responden Tentang Anggota BPD Melakukan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Program Pemerintahan Desa

No	Keterangan	Frekwensi	Persentase
1	Selalu	-	-
2	pernah	18	100 %
3	Kadang-kadang	-	-
4	Sangat jarang	-	-
5	Tidak pernah	-	-
Jumlah		18	100 %

Sumber Data : Penelitian Tahun 2009

Dari table di atas dapat diketahui bahwa semua responden (100 %) mengatakan BPD pernah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.

Menurut Misnu anggota BPD (wawancara 21 mei 2009) ia mengatakan kami pernah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah desa terutama program yang tertuang dalam APBDesa dan kami juga melakukan evaluasi terhadap dan yang turun dari pemerintah kabupaten sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta) pertahun, hal tersebut kami lakukan agar tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut.

Sehubungan dengan hal itu hasil interview penulis dengan Kepala Desa Hasan Alwi (wawancara 23 mei 2009) ia mengatakan BPD minimal 6 (enam) bulan

sekali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pemerintahan Desa dan BPD mengundang perangkat desa serta menanyakan sejauh mana Pemerintah Desa melaksanakan program yang telah disusun oleh Pemerintah Desa bersama dengan BPD.

Tabel V.23 Distribusi Jawaban Responden Tentang Anggota BPD Mengajukan Perubahan Terhadap Setiap Rencana Peraturan Desa

No	Keterangan	Frekwensi	Persentase
1	Selalu	-	-
2	Pernah	-	-
3	Kadang-kadang	-	-
4	Sangat jarang	-	-
5	Tidak pernah	18	100 %
Jumlah		18	100 %

Sumber Data : Penelitian Tahun 2009

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa semua responden (100 %) mengatakan BPD tidak pernah mengajukan perubahan pada setiap rencana Peraturan Desa.

Berdasarkan hasil interview penulis dengan Hasbullah Ilham ketua BPD (wawancara 23 mei 2009) ia mengatakan kami tidak pernah melakukan perubahan terhadap rencana Peraturan Desa, sebab selama ini Peraturan Desa yang kami buat tidak ada keluhan dari masyarakat dan kami menganggap ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Kemudian hasil interview penulis dengan Khoiri kepala urusan umum (wawancara 23 mei 2009) ia mengatakan selama ini yang saya ketahui BPD tidak pernah melakukan perubahan terhadap rencana Peraturan Desa di Desa ini.

C. Analisis Identitas Responden

a. Identitas responden berdasarkan umur

Usia merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi seseorang dalam melakukan aktifitas atau tugasnya, semakin tua umur seseorang maka semakin banyak pengalaman hidupnya. Apabila muda umur seseorang berarti masih belum banyak pengalamannya. Akan tetapi hal ini akan terbalik apabila dikaitkan dengan semangat jiwa muda yang produktif dalam melakukan tugasnya tentu hasil kerja akan lebih baik dari pada hasil kerja yang dibuat oleh orang-orang yang sudah tidak produktif.

Dari table V.2 diketahui dari 18 responden terdapat 4 orang (28,58 %) yang berumur 21-27 tahun, 2 orang (14,29 %) yang berumur 28-34 tahun, 6 orang (42,86 %) yang berumur 35-41 tahun, 4 orang (28,58 %) yang berumur 42-48 tahun, dan 2 orang (14,29 %) yang berumur 49-55 tahun.

b. Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang akan sangat mempengaruhi tindakan-tindakan yang akan dibuatnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin pekerjaan atau tugas yang akan diembannya. Karena orang yang berpendidikan tinggi cara berfikir dan kerjanya akan berbeda dengan orang yang rendah tingkat pendidikannya. Hal ini tentunya harus didukung pengetahuan dan pengalaman tentang tugas yang harus dikerjakannya.

Dari table V.3 dapat diketahui dari 14 responden terdapat 4 orang (28,58 %) tamatan SD, 4 orang (28,58 %) tamatan SLTP, 6 orang (42,86 %) tamatan

SLTA, 2 orang (14,29 %) tamatan diploma, dan 2 orang (14,29 %) yang tamatan Strata satu (S 1).

Berdasarkan data bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) BPD dan Pemerintah Desa Tanjung Bakau sudah cukup memadai akan tetapi semua itu harus didukung dengan kemampuan yang lebih baik lagi bagi BPD dalam memahami peranannya sebagai BPD karena lembaga ini adalah lembaga yang relatif baru di dalam sistem Pemerintahan Desa dan butuh perubahan khusus untuk anggotanya.

D. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Menurut Soejono Soekanto (2005:243) peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan, dalam hal ini peranan diartikan sebagai sebagai sebuah fungsi lembaga yang memiliki tugas-tugas tertentu seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga baru dalam sistem pemerintahan nasional sebagai mana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang membahas tentang BPD bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi legislasi, *kontrolling* dan *budgeting* serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Upaya-upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan yang utama diantaranya :

a. Metode pengawasan yang terdiri dari pengawasan langsung dan meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.

1. Pengawasan langsung

Pengawasan yang dilakukan BPD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) serta keputusan Kepala Desa. Pengawasan dapat diartikan sebagai kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana. Pengertian ini akan digunakan oleh untuk BPD yang memiliki tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa.

Pengawasan yaitu melakukan interview atau wawancara kepada kepala desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dari table V.14 dapat diketahui bahwa semua responden (100 %) mengatakan BPD selalu melakukan wawancara dengan kepala desa mengenai pelaksanaan pemerintahan desa.

Sehubungan dengan itu hasil interview penulis dengan Hasullah ilham selaku ketua BPD (wawancara 20 Mei 2009) ia mengatakan kami selalu melakukan wawancara dengan Pemerintahan Desa tentang anggaran yang akan ditetapkan untuk menjadi program tahunan, kemudian kami juga akan selalu melakukan wawancara tentang pembangunan Desa terutama pembangunan proyek yang turun dari pemerintahan kabupaten bengkalis seperti pembangunan perbaikan rumah adat dan rumah orang miskin. Kemudian kami juga pernah melakukan konsultasi kepada pemerintah desa tentang keluhan masyarakat kepada pemerintah desa.

Hasil interview penulis dengan Khoiri selaku Kepala Urusan Umum BPD (wawancara 21 mei 2009) ia mengatakan selama ini BPD selalu melakukan wawancara dengan Pemerintah Desa tentang pelaksanaan Pemerintah Desa, pelayanan pemerintah desa pada masyarakat, BPD juga pernah mengundang Pemerintah Desa untuk menanyakan apakah ada kendala dari Pemerintah Desa dalam menjalankan fungsinya sebagai Pemerintah Desa di Desa Tanjung Bakau

2. Meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap 1 (satu) kali dalam satu tahun

Meminta laporan pertanggungjawaban adalah tugas BPD, karena salah satu bentuk pengawasan nyata adalah meminta laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa. Sedangkan melaporkan laporan pertanggungjawaban adalah tugas kepala desa, apabila ini dilakukan berarti dua lembaga Pemerintahan Desa sudah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

Dari tabel V.15 dapat dilihat semua anggota BPD mengatakan kepala desa pernah melaporkan hasil kerja Pemerintahan Desa kepada BPD.

Senada dengan itu hasil interview penulis dengan Safarudin Sifa salah seorang anggota BPD (wawancara 21 mei 2009) mengatakan selama ini Pemerintah Desa selalu melaporkan hasil kerja pemerintah Desa kepada BPD paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Seperti melaporkan penggunaan anggaran, pelaksanaan atau pengoperasian peraturan-peraturan yang telah dibuat bersama. BPD sendiri pernah menolak laporan pertanggungjawaban Kepala Desa pada tahun 2006 karena tersangkut pada masalah keuangan yang kurang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan bersama-sama BPD dalam pembuatan APBDesa

Tahun 2005, kemudian Kepala Desa diminta untuk melengkapi kekurangannya kemudian diadakan laporan pertanggungjawaban ulang.

Dari kuesioner dan wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa BPD Tanjung Bakau sangat teliti mengenai laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Desa.

- b. langkah- langkah pengawasan yang terdiri dari pemeriksaan terhadap administrasi pemerintahan Desa, pemeriksaan pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan lainnya, pemeriksaan terhadap pelaksanaan keputusan kepala desa, pemeriksaan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), pemeriksaan terhadap kebijakan pemerintahan Desa, serta melakukan perbaikan setelah melakukan pengawasan.

1. Pemeriksaan Terhadap Administrasi Pemerintahan Desa

Perlengkapan Administrasi Desa sangat penting di dalam menjalankan fungsinya sebagai Pemerintahan Desa. Jika administrasinya tidak lengkap maka akan ada hambatan dalam menjalankan fungsinya sebagai Pemerintahan Desa sehingga berimbas terhadap program yang akan dilkaskan oleh Pemerintah Desa

. Dari table V.16 dapat diketahui bahwa semua responden (100 %) mengatakan selalu melakukan pemeriksaan terhadap administrasi Pemerintahan Desa.

Sehubungan dengan keterangan di atas, hasil interview penulis dengan Milatul Bahri salah seorang anggota BPD (wawancara 18 mei 2009), ia

mengatakan kami selalu melakukan pemeriksaan terhadap administrasi Pemerintahan Desa kami juga pernah menanyakan tentang tata cara pembuatan akte tanah dan pembuatan kartu tanda penduduk dan kami juga sering berkonsultasi kepada Pemerintah Desa terutama kepada Kepala Desa tentang proses administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Hasil interview penulis dengan Sekretaris Desa Faisal Masrur (wawancara 18 mei 2009) mengatakan selama ini BPD selalu melakukan pemeriksaan terhadap administrasi Pemerintahan Desa dan BPD juga pernah menanyakan kepada Pemerintah Desa tentang administrasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Desa

Dari hasil kuesioner dan wawancara penulis dengan BPD dan Pemerintah Desa dapat diambil kesimpulan bahwa BPD kurang berperan dalam melakukan pemeriksaan pada administrasi Pemerintahan Desa.

2. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan lainnya

Tugas mengawasi Pemerintah Desa dalam melaksanakan peraturan desa dan peraturan lalinnya adalah tugas BPD, apabila hal ini dilakukan dilakukan oleh BPD maka kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan semakin baik.

Suatu komunitas masyarakat akan merasa terlindungi dan terarah apabila adanya peraturan yang mengikat dalam kesatuan masyarakat hukum tersebut. Pemerintah merupakan lembaga yang bertanggungjawab dalam membuat aturan, agar aktifitas pemerintah maupun akitfitas masyarakat mempunyai pedoman yang dijadikan landasan, peraturan yang dibuat tidak ada gunanya apa bila tidak dijalankan dalam hal ini peraturan desa, peranan Badan Permusyaaratan Desa

(BPD) sebagai fungsi pengawasan sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang diwakilinya.

Berdasarkan tabel V.17 dapat diketahui bahwa dari 18 orang responden terdapat 16 orang responden (80,5 %) yang mengatakan selalu melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan-peraturan lainnya, kemudian 2 orang responden (10,5 %) mengatakan hanya kadang-kadang di dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

Hasil interview penulis dengan In'am salah seorang anggota BPD (wawancara 19 mei 2009) mengatakan BPD Tanjung Bakau selalu melakukan pengawasan kepada Pemerintah Desa tentang pelaksanaan peraturan-peraturan yang ada. Dan selama ini BPD menganggap bahwa pemerintah desa belum pernah melakukan penyimpangan, hanya saja kurang produktif di dalam menyikapi permasalahan di desa. Salah satu bentuk konkret pengawasan yang dilakukan oleh BPD adalah meminta laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa setiap satu kali dalam setahun.

Kemudian hasil interview penulis dengan Khoris selaku Kepala Urusan Umum (wawancara 19 mei 2009) ia mengatakan bahwa selama ini BPD hanya kadang-kadang saja di dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan Desa.

Dari hasil kuesioner dan wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa BPD selalu mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa, hal ini dibuktikan dengan BPD meminta laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa setiap akhir periode

3. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan keputusan Kepala Desa

Keputusan kepala desa sangat membantu dalam penyelenggaraan pemerintah desa sehingga ini sangat membantu dalam menjalankan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

Keputusan Kepala Desa di sini adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh kepala desa sebagai landasan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa. Masalah ini juga tugas pengawasannya diemban oleh BPD.

Berdasarkan table V. 17 dapat diketahui bahwa semua responden (100 %) mengatakan BPD pernah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan keputusan Kepala Desa.

Senada dengan hal itu interview penulis dengan Hasbullah Ilham selaku ketua BPD (wawancara 20 Mei 2009) ia mengatakan bahwa kami BPD pernah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan keputusan kepala desa seperti keputusan Kepala Desa melakukan perlombaan dalam memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia serta keputusan Kepala Desa mengenai pemungutan dana dari pasar satu minggu sekali di desa Tanjung Bakau.

Sehubungan dengan itu hasil interview penulis dengan Fadli selaku kepala urusan pembangunan (wawancara 22 Mei 2009) ia mengatakan selama ini saya melihat BPD pernah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan keputusan Kepala Desa, BPD menanyakan apakah keputusan yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa itu sudah dijalankan atau belum, ia juga mengatakan percuma kalau keputusan itu dibuat tetapi tidak dilaksanakan.

Dari data kuesioner dan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Tugas BPD ini apabila dilakukan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Desa akan terlaksana dengan baik.

4. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa atau pemerintah desa, apabila APBDesa tidak dibuat berarti desa tersebut tidak memiliki perencanaan keuangan yang menunjang perkembangan pembangunan Desa.

Tugas pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa, terutama sekali masalah penggunaan APBDesa atau hal-hal yang berkaitan dengan keuangan Desa. Apabila pengawasan tidak dilakukan maka penyelewengan atau kesemena-menaan akan mudah saja terjadi.

Berdasarkan table V.12 dapat diketahui bahwa dari 18 orang responden seluruh responden (100 %) mengatakan selalu melakukan pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Sejalan dengan itu seorang anggota BPD Milatul Bahri (wawancara 22 mei 2009) mengatakahn BPD melakukan pengawasan terhadap penggunaan ABPDesa atau dana lainnya dalam bentuk meminta laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran. Selain itu anggota BPD juga selalu memantau dilapangan bagaimana peleksanaan program kerja tersebut. BPD juga

melakukan pengawasan terhadap tanah kas Desa yaitu tanah yang ditanami karet. Sehubungan dengan itu Kepala Desa Tanjung Bakau Hasan alwi (wawancara 21 mei 2009) mengatakan ia sering melaporkan penggunaan keuangan desa yang diminta oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kemudian hasil interview penulis dengan Khoiri Kepala Urusan Umum (wawancara 20 mei 2009) mengatakan selama ini kami melihat BPD sering melakukan pengawasan terhadap APBDesa, BPD juga selalu menanyakan berapa dana yang digunakan Pemerintah Desa dalam menjalankan setiap program Desa dalam waktu satu bulan.

5. Pemeriksaan terhadap kebijaksanaan Pemerintahan Desa

Kebijaksanaan Pemerintah Desa adalah suatu kebijaksanaan yang dibuat oleh kepala desa bersama dengan BPD dalam proses untuk memperlancar program Pemerintah Desa.

Dari tabel V.19 dapat diketahui bahwa semua responden (100 %) mengatakan BPD pernah melakukan pemeriksaan terhadap kebijaksanaan pemerintahan desa.

Sejalan dengan itu hasil interview penulis dengan Milatul Bahri (wawancara 22 Mei 2009) ia mengatakan kami BPD sebagai wakil dari masyarakat desa harus melakukan pemeriksaan terhadap kebijaksanaan pemerintah desa, ini bertujuan agar kami dapat melihat apakah kebijaksanaan desa itu sesuai atau tidak dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Dari data kuesioner dan wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan Kepala Desa.

b. Membandingkan hasil pemeriksaaan dengan rencana yang telah ditetapkan

Yaitu membandingkan hasil pemeriksaan dengan rencana yang telah ditetapkan baik rencana yang dibuat oleh Pemerintah Desa bersama dengan BPD maupun rencana yang dibuat oleh Pemerintah Desa sendiri

Dari table V.20 dapat diketahui bahwa semua responden (100 %) mengatakan BPD pernah membandingkan hasil pemeriksaan dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

Bersamaan dengan itu hasil interview penulis dengan anggota BPD Suharno (wawancara 19 Mei 2009) mengatakan kami selaku BPD pernah melakukan pengawasan yaitu melakukan perbandingan dengan melakukan pemeriksaan apakah program yang dijalankan Pemerintah Desa selama ini sesuai atau tidak dengan prosedur yang berlaku, jadi dengan pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah ada penyimpangan atau tidak dari Pemerintah Desa dalam melaksanakan program yang telah direncanakan.

Senada dengan itu menurut Sekretaris Desa Tanjung Bakau Faisal masrur (wawancra 18 Mei 2009) ia mengatakan selama ini saya melihat BPD pernah melakukan pemeriksaan dengan rencana yang telah ditetapkan dan kemudian BPD menanyakan mengapa selama ini Pemerintah Desa kurang produktif dalam melaksanakan peraturan desa serta kebijaksanaan yang dibuat oleh Kepala Desa itu sendiri.

Dari data kuesioner dan data wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melakukan pengawasan dengan baik.

c. Evaluasi pengawasan

Evaluasi pengawasan ini sangat penting dilakukan oleh BPD yaitu untuk menindaklanjuti kebijakan setelah melakukan pengawasan apabila didapati ada penyimpangan yang dilakukan Pemerintah Desa dalam menjalankan fungsinya.

Dari table V.22 dapat diketahui bahwa semua responden (100 %) mengatakan BPD pernah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Menurut Misnu anggota BPD (wawancara 21 Mei 2009) ia mengatakan kami pernah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah desa terutama program yang tertuang dalam APBDesa dan kami juga melakukan evaluasi terhadap dan yang turun dari pemerintah kabupaten sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta) pertahun, hal tersebut kami lakukan agar tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut.

Sehubungan dengan hal itu hasil interview penulis dengan Kepala Desa Hasan Alwi (wawancara 23 mei 2009) ia mengatakan BPD minimal 6 (enam) bulan sekali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pemerintahan Desa dan BPD mengundang perangkat desa serta menanyakan sejauh mana Pemerintah Desa melaksanakan program yang telah disusun oleh Pemerintah Desa bersama dengan BPD.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Khairul, Muhammad Ras Muis, *Parlemen Desa Membangun Demokrasi Dari Bawah*, Unri Pers 2003.

Cahyono Heru, *Konflik Elit Politik DiPerdesaan*, Pustaka Pelajar, Jakarta 2005.

Kartono, Kartini *pemimpin dan Kepemimpinan*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta 2002

Labowo Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, PT Rajawali Pers. Jakarta, 2006.

Siagian, Sondang P, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta 2004.

Singarimbun Masri, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 2006.

Soekanto Soejono, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, PT Rajawali Grafindo Persada. Jakarta, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Desa*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta 2004

Thoha Miftah, *Kepemimpinandan Manajemen Suatu Pendekatan Prilaku*, Sinar Baru Bandung, 1990

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Peraturan Desa

Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999, Fokus Media 2004

Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004, Fokus Media 2004

BIOGRAFI PENULIS



Anton Maulana (lahir 24 oktober 1986 di Desa Tanjung Samak
Kecamatan Rangsang Kabupaten
Kepulauan Meranti)
pendidikan formal diawali dari SDN 050 Tanjung Samak
tamat pada tahun 1999
selanjutnya meneruskan ke SMPN 2 Rangsang
dan tamat pada tahun 2002
pada tahun 2005 menamatkan pendidikan
Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Rangsang
dan pada bulan September 2005 melanjutkan pendidikan Strata 1
di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
dengan jurusan Administrasi Negara
dengan masa study delapan semester (empat tahun)
ujian skripsi pada hari kamis tanggal 16 Juli 2009
wisuda pada tanggal 07 November 2009
dan menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos)